

Politik Digital: Manifestasi Komunikasi di Era Digital

Ira Aryanti Rasyi Lubis¹, Ahmad Taufiq Maulana Ramdan², Detya Wiryany³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Membangun

Jl. Soekarno Hatta No.448, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266

E-mail: ¹ira.aryanti@inaba.ac.id, ²ahmad.taufiq@inaba.ac.id, ³detya.wiryany@inaba.ac.id

Received: Februari 2022; Accepted: April 2022; Published: Juni 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manifestasi komunikasi di era digital dengan harapan dapat menjawab bagaimana perkembangan politik digital dalam komunikasi politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana menggunakan beberapa pendekatan dalam pencarian data. Berawal dari studi pustaka melalui literatur-literatur yang ada sebelum terjun pada tahap observasi. Observasi dilakukan terhadap pola-pola komunikasi politik yang terjadi di dunia digital dan diakhir dengan konfirmasi kepada ahli dalam bentuk wawancara untuk menegaskan data yang sudah diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki indeks demokrasi yang terus menurun, namun dengan hadirnya teknologi digital saat ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam penguatan sistem demokrasi yang di anut oleh Indonesia. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam membuka ruang demokrasi yang lebih jujur dan adil seperti proses pemilihan umum (Pemilu) yang mulai dilakukan perubahan dengan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Komisi pemilihan umum (KPU) sudah mulai menyusun regulasi serta pengembangan aplikasi agar proses Pemilu dengan pemanfaatan teknologi digital dapat segera diterapkan sehingga harapannya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat lebih meningkat.

Kata Kunci: Komunikasi; digital; Komunikasi politik; demokrasi.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Manusia dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari di mana pun mereka berada di rumah, di tempat kerja, di pasar, di masyarakat. Tidak ada manusia yang akan menghindari komunikasi dengan orang lain. Kemampuan berkomunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, perluasan pengetahuan manusia setiap hari dimungkinkan oleh komunikasi. Komunikasi merupakan bagian dari sistem sosial yang bergantung padanya, sehingga komunikasi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu yang bermanfaat untuk menumbuhkan saling pengertian adalah proses komunikasi. Informasi yang dikirimkan selama proses ini mungkin memiliki dampak khusus pada komunikan. Informasi ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain melalui komunikasi, yang melibatkan penggunaan simbol seperti kata-kata, angka, dan gambar serta memberikan pidato dan tulisan persuasif untuk menyampaikan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain (Muhammad, 2005). Kontak dan interaksi manusia, antara individu dan kelompok, adalah komunikasi. Disadari atau tidak, komunikasi merupakan komponen integral dari kehidupan sehari-hari.

Effendy (Cangara, 2008) mengkategorikan komunikasi menjadi tiga kategori: komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi pribadi. Ada dua kategori komunikasi interpersonal: pertama, komunikasi intrapribadi, dialog internal seseorang disebut sebagai komunikasi intrapribadi. Subjek terlibat dalam komunikasi baik sebagai komunikator maupun komunikan. Berbicara pada dirinya sendiri, dia. Karena seseorang mempersiapkan

doi: <https://doi.org/10.51544/jlmi.v6i1.1819>

© 2021 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/index>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

suatu objek yang mereka amati dan kemudian memikirkannya kembali, suatu pola komunikasi dengan dirinya sendiri berkembang dan terjadi. Kedua, komunikasi antarpribadi, yang mengacu pada percakapan antara dua orang atau lebih.

Komunikasi kelompok berguna untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka antara tiga orang atau lebih. Hal ini memungkinkan semua anggota untuk secara akurat mengembangkan sifat-sifat pribadi anggota lain. Menyampaikan komunikasi melalui media populer seperti surat kabar, radio, televisi, dan film yang diputar di bioskop dikenal sebagai komunikasi massa. Karena ada banyak orang yang menerima informasi, komunikasi massa memiliki kualitas universal.

Penonton dapat mengalami efek kognitif, emotif, dan perilaku sebagai hasil dari komunikasi. Kemungkinan audiens terkena dampak liputan media meningkat seiring dengan frekuensi dan durasi konsumsi media (Wahid, 2016). Pengaruh berbagai pesan/komunikasi yang diterjemahkan ke dalam pertukaran komunikasi untuk khalayak sasaran yang menjadi sasaran media dan saluran politik lainnya dikenal sebagai efek komunikasi. Efek media langsung dan tidak langsung/tertunda juga ada. Ada efek media positif dan negatif. Efek komunikasi yang muncul bersamaan dengan penerbitan konten media dikenal sebagai “efek komunikasi langsung” (Wahid, 2016). Efek yang muncul setelah rilis konten media di media tradisional, seperti media cetak dan elektronik, dikenal sebagai efek tidak langsung atau tertunda. Efek langsung terjadi secara bersamaan dan di antara basis pengguna yang cukup besar di media sosial dan media baru. Hal ini terjadi karena media sosial dan media baru berbeda kualitasnya dengan media massa.

Penggunaan media sosial yang meluas dan memiliki jangkauan pengguna yang luas dilakukan oleh sejumlah kalangan yang berbeda, baik kalangan bisnis, institusi, organisasi, maupun individu pada umumnya. Orang-orang penting, seperti tokoh masyarakat, politisi, selebriti, dan influencer juga menggunakan media sosial. Pesatnya kemajuan teknologi telah melewati banyak kesenjangan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk politik (Nurfakhri, 2022). Saat ini penggunaan media sosial telah berkembang menjadi arena politik yang sangat mudah diakses oleh semua kalangan, mulai dari pemerintah dalam mensosialisasikan program kerjanya, politisi dan partai politik dalam meningkatkan elektabilitas dan popularitas, bahkan masyarakat sipil pada umumnya menggunakan media sosial untuk mengakses informasi.

Informasi yang berkembang saat ini, bahkan menggunakan media sosial sangat mudah diakses oleh siapa saja, tanpa memandang usia, dan sangat terbuka (Wahyudi, 2018). Belakangan ini, peran Internet dalam dunia politik Indonesia semakin penting, baik positif maupun negatif. Dalam konteks pembahasan komunikasi politik Indonesia ke depan, jelas terlihat bahwa selalu tumpang tindih dengan teori komunikasi politik online. Ini berdasarkan beberapa diskusi.

Pertama, Internet Indonesia terus berkembang baik dari segi jumlah pengguna maupun teknologi. Dimulai dengan 1% dari total populasi pada tahun 1998 (Lim, 2003, 275), penetrasi internet Indonesia telah melampaui 50% dari total populasi Indonesia (APJII, 2016). Banyaknya pengguna internet di Indonesia telah mempengaruhi menjamurnya aktivitas yang dikenal dengan cyberpolitics, penggunaan media online sebagai sarana komunikasi politik. Pemilu federal 2014 adalah contoh nyata penggunaan Internet, khususnya media sosial, dalam proses komunikasi politik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air per Januari 2022. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021,

jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25%. Sementara itu tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal 2022. Tercatat, total penduduk Indonesia berjumlah 277,7 juta orang pada Januari 2022.

Kedua, melihat rakyat sebagai elemen penting dalam komunikasi politik, menjadikan Internet sebagai masyarakat Indonesia di tengah hilangnya kepercayaan publik terhadap media/media tradisional yang lebih didominasi pasar dan kekuatan politik. (Nugroho, 2012; Patria, 2013). Seperti diketahui, era Reformasi Keagamaan tahun berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, membuka ruang yang besar bagi pendirian media massa bagi masyarakat Indonesia. Setelah reformasi, media massa Indonesia mengalami apa yang disebut euforia karena Suharto membungkam media selama beberapa dekade. Namun, sekitar 10 tahun setelah reformasi, media massa menemukan tantangan baru. Penguasaan media massa/pers tetap, hanya aktor yang mengendalikannya saja yang berbeda. Di era orde baru, negara mendominasi media selama reformasi berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik. Dalam sistem media massa ini, media massa/kantor berita tidak memberikan ruang yang cukup bagi warga untuk berekspresi, tetapi justru memberikan ruang bagi elite untuk kekuasaan politik.

Penggunaan teknologi komunikasi digital untuk mendorong partisipasi publik dalam demokrasi dikenal sebagai “demokrasi digital”, dan media sosial telah membuka area baru untuk studi demokrasi. Munculnya istilah “demokrasi digital” yang menggambarkan bagaimana kehidupan demokrasi terjadi di dunia internet, menggambarkan bagaimana internet sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi berperan dalam merevolusi sistem, struktur, dan proses demokrasi yang telah telah dilaksanakan sejauh ini. Penggunaan media sosial dalam politik pasti akan mendorong diskusi publik tentang keadaan yang ada. Media sosial digunakan sebagai ukuran keterlibatan politik dalam konteks demokrasi digital karena kita dapat melihat bahwa pemilih dapat menggunakannya untuk menyuarakan pemikiran mereka tentang masalah politik (Wahyudi, 2018).

Penyebaran global kecanggihan teknologi memiliki dampak besar pada evolusi media komunikasi. Dalam kehidupan manusia, komunikasi sangatlah penting. Manusia berkomunikasi secara lisan dan tulisan untuk berinteraksi dan membangun ikatan sosial. Makhluh hidup dapat berhubungan satu sama lain, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, oleh karena itu komunikasi bukanlah hal baru bagi mereka. Manusia dapat berkomunikasi secara verbal dengan makhluk hidup lainnya dengan menggunakan kata-kata, tetapi mereka juga dapat berkomunikasi secara nonverbal atau melalui tindakan. Mengambil interaksi antara manusia dan hewan peliharaan mereka sebagai contoh. Orang-orang akan mengerti mengapa anjing mereka berisik, seperti ketika mereka lapar atau hanya ingin diajak bermain. Tentunya penggunaan media komunikasi dapat mempermudah komunikasi tersebut.

Media komunikasi adalah alat yang digunakan untuk memfasilitasi transmisi dan penerimaan pesan untuk tujuan tertentu. Komunikasi maju seiring dengan kecanggihan teknologi yang ada di masyarakat jika manusia menjalani kehidupan yang berkembang. Komunikasi membutuhkan dukungan dari media komunikasi yang mayoritas terhubung dengan teknologi, oleh karena itu komunikasi tumbuh mengikuti perubahan teknologi. Misalnya, teknologi telepon seluler akan digunakan untuk komunikasi antara dua orang di negara yang berbeda.

Pada 1970-an, komunikasi analog terus maju dengan diperkenalkannya komunikasi digital. Komunikasi manusia pada awalnya dibantu oleh perkembangan komunikasi analog.

Komunikasi analog menjadi kurang efektif seiring dengan kemajuan teknologi. Pesan yang dikirim dan diterima menggunakan transmisi analog tidak optimal karena masih bergantung pada kekuatan sinyal, sehingga tidak praktis. Sinyal analog dengan amplitudo dan frekuensi digunakan sebagai media komunikasi dalam komunikasi analog, yang merupakan metode komunikasi. Jika sinyal yang dikirim jelas dan kuat, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif. Sinyal akan semakin lemah semakin jauh media komunikasi dari sinyal pemancar. Selain itu, kedekatan antara sinyal dan media komunikasi akan meningkatkan kekuatan sinyal dan mengoptimalkan efektivitas penyampaian pesan.

Media komunikasi analog menghasilkan lebih banyak noise atau interferensi. Karena kekuatan sinyal yang dihasilkan menentukan seberapa cepat komunikasi dapat terjadi dengan media komunikasi analog, hal ini biasanya terjadi. Sinyal digital dibuat dari sinyal analog menggunakan teknologi mutakhir ini. Kemudian, masyarakat bisa lebih mudah menggunakan dan mengandalkan saluran komunikasi. Sistem komunikasi masyarakat mengikuti peningkatan pesat dalam kompleksitas teknis ini. Misalnya, perangkat komunikasi analog dari zaman analog, seperti jam analog, mesin tik, kompas, telepon rumah, kamera film, dan perangkat lainnya, saat ini menjadi lebih kompleks dan berguna. Mayoritas jam tangan adalah digital, ponsel portabel di mana-mana, laptop mulai menggantikan komputer desktop sebagai bentuk komputasi utama, dan ada juga bentuk komunikasi lainnya. Selain itu, jaringan internet mendukung media komunikasi digital ini, sehingga memudahkan orang untuk terhubung tanpa menghabiskan banyak uang.

Media komunikasi digital ini dinilai efektif, bermanfaat, terjangkau, serta pengiriman dan penerimaan pesannya cepat. Namun demikian, ada juga kekurangan dalam menggunakan saluran komunikasi digital, salah satunya adalah perlunya konfirmasi keakuratan informasi yang diterima. Masalah lainnya adalah, khususnya ketika menggunakan warna, media komunikasi digital terkadang dapat mengkomunikasikan makna yang berbeda dari bentuk aslinya. Data digital digunakan untuk menyampaikan dan menerima pesan menggunakan media komunikasi digital ini. Akibatnya, kecuali jika mereka telah direplikasi atau disalin, pesan lebih rentan terhadap perubahan.

Karena banyaknya generasi millennial yang memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi secara publik, alat komunikasi digital saat ini tidak lagi dianggap sebagai media privat. Saluran komunikasi digital yang memanfaatkan jaringan internet adalah media sosial. Berbagai kemampuan yang tersedia dalam suatu media yang memanfaatkan jaringan internet membuat komunikasi menjadi lebih sederhana. Media informasi seperti media komunikasi berbasis messenger, whatsapp, line, bee talk, kokoatalk, dan lain-lain dapat digunakan sebagai media komunikasi digital dengan menggunakan jaringan internet.

Media digital berbasis jejaring sosial, antara lain Facebook, Instagram, TikTok, Path, Snapchat, dan lain-lain. Media komunikasi digital ini dimaksudkan untuk mengembangkan perusahaan selain digunakan untuk percakapan sehari-hari. Media sosial sering digunakan sebagai alat hubungan masyarakat untuk bisnis online. Manfaat dari sistem pengiriman pesan otomatis salah satunya adalah media digital. Saat menggunakan jaringan internet, media komunikasi canggih era digital saat ini dapat ditransfer dengan kapasitas data yang cukup besar berupa data dan media penyimpanan yang tidak ada habisnya. Ide dasar komunikasi digital adalah ide penting untuk memahaminya. Ide internet adalah salah satunya, bersama dengan komponen lainnya. Mengikuti penciptaan alat berbasis teknologi, ide komunikasi digital akan terus berkembang.

Di era digital, toleransi menjadi salah satu prinsip utama yang harus dipraktikkan oleh semua kalangan. Alasannya karena saling menghargai perbedaan akan membuat keragaman

multidimensi terasa menarik. Di atas kertas, Indonesia memiliki lingkungan yang toleran. Sejumlah indikasi, sementara itu, masih perlu perbaikan cepat. Kemampuan menggunakan teknologi adalah salah satunya. Pengguna teknologi didorong untuk mempelajari alat digital, tetapi mereka juga diharapkan bertanggung jawab atas perilaku online mereka. Literasi digital sangat penting untuk mewujudkan praktik demokrasi dan toleransi di era digital karena hal ini.

Saat ini, teknologi digital dipandang sebagai kekuatan baru yang dapat menghasilkan berbagai hal. Sebut saja konflik antara kepentingan politik dan ekonomi. Dengan menggantikan kekuatan masa lalu yang tertutup, tidak dapat diakses, dan dikendalikan secara terpusat, teknologi digital membangun keseimbangan baru. Kekuatan baru menggunakan media sosial untuk mendistribusikan konten yang membangkitkan semangat, termasuk pesan toleransi satu sama lain, dan inklusif untuk banyak orang.

Warga negara pluralistik yang juga salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ini harus menjunjung tinggi norma toleransi, khususnya dalam memanfaatkan media digital. Salah satu cara untuk meningkatkan demokrasi dan toleransi di era internet adalah dengan menyebarkan pesan toleransi secara luas. Selain itu, sejumlah besar konten yang mengangkat dan mendidik harus tersedia dalam masyarakat demokratis. Ruang pertemuan juga harus tersedia secara online untuk organisasi dari berbagai latar belakang.

Demokrasi digital mengacu pada konsepsi tertentu tentang demokrasi dan meluasnya penggunaan jaringan dan media digital untuk politik, baik online, offline, atau dalam kombinasi. Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial, ia mengklaim bahwa demokrasi digital memiliki berbagai keunggulan. Sebagai sumber segar untuk berita politik, diskusi, dan mobilisasi, misalnya. Selain itu, demokrasi digital menyetarakan akses informasi sehingga setiap orang memiliki akses terhadap informasi yang sama. Orang-orang yang sebelumnya diam atau dikucilkan dari informasi politik sekarang dapat melakukannya. terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dan kecenderungan politik yang lemah. Demokrasi digital juga memastikan keberadaan nilai-nilai egaliter, kita harus belajar menciptakan area aman di mana setiap orang dapat dengan bebas menyuarakan pendapatnya. Jika berbeda, maka kita harus membentuk forum diskusi yang konstruktif untuk mengembangkan pemikiran dan pemahaman bersama (Kirom,2022).

Selain banyak manfaat demokrasi digital, ada sejumlah argumen yang berpendapat bahwa karena memungkinkan kebebasan berbicara dan berpendapat yang luas, demokrasi digital akan sangat rentan terhadap apropriasi ideologis oleh globalisasi melalui instrumen global. Selain itu, tren online yang menawarkan ruang bebas adalah depolitisasi anak muda dalam politik dunia nyata. Poin kuncinya adalah bahwa teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam proses politik dan demokrasi saat ini di mana demokrasi diterapkan.

Media sosial, seperti halnya internet, berperan signifikan dalam pertumbuhan industri yang merambah perkembangan dunia pendidikan, bisnis, dan politik. Media sosial seringkali memberikan ruang bagi orang untuk berkomentar, seperti dengan menyediakan ruang komentar di kolom tersendiri, misalnya. Komentar tidak hanya disampaikan kepada redaksi tetapi juga sebagai ekspresi politik yang kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat luas, khususnya dalam dunia politik digital dimana masyarakat dapat lebih cepat dan merespon informasi yang mereka butuhkan. mungkin berasal dari orang yang berbeda (Wahyudi,2018).

Media sosial memberikan kesempatan kepada pemilih untuk segera membalas atau merangsang diskusi politik secara online. Partai politik dan kandidat yang mereka dukung telah menjadikan penggunaan media sosial untuk komunikasi politik sebagai praktik yang populer.

Partai-partai politik di Indonesia mulai memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan materi politik kepada masyarakat luas atau sekadar mempertahankan jaringan yang ada, khususnya untuk memenangkan hati masyarakat.

Pola dan fungsi masyarakat sebagai aktor politik sendiri mengubah cara politik dikomunikasikan. Elit politik yang berkepentingan dapat mengambil keuntungan dari penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan publik sebagai target yang harus dibujuk. Media sosial merupakan platform baru untuk komunikasi antar komunitas, sehingga tidak hanya relevan bagi aktor politik atau elit politik. Baik warga berinteraksi dengan negara atau tidak, media sosial membentuk pola komunikasi mereka sebagai aktor politik dan menjadi bukti bagaimana komunikasi politik berkembang di era digital.

TINJAUAN LITERATUR

Komunikasi Politik Di Era Digital

Dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara pemain kunci dalam masyarakat, seperti partai dan lembaga negara yang dikenal sebagai elit dan warga negara atau nonelite, media digital menciptakan platform untuk komunikasi dan keterlibatan politik. Berdasarkan karakteristik baru Internet yang tidak dimiliki media massa tradisional, seperti interaktif, aktif, dan langsung kreatif, hal ini mendorong kesetaraan dan jejaring. Dalam proses demokrasi, hal ini memerlukan penciptaan forum untuk konfirmasi dan pertukaran informasi, pengembangan wacana publik, pengembangan diskusi, dan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik.

Proses demokrasi sangat bergantung pada komunikasi politik. Transformasi juga terjadi dalam komunikasi politik, salah satu komponen kunci dari proses demokrasi. Efek dari praktik percakapan politik yang mencakup komunikasi yang dimediasi oleh dunia maya dan diskusi yang berlangsung di ruang nyata telah dibawa oleh Internet sebagai media baru. Di Internet, persaingan telah menggantikan protes jalanan yang sangat besar, ePoll menangani pemungutan suara langsung, dan partisipasi adalah cara bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Politik dulunya dikomunikasikan melalui orasi atau pidato yang ditujukan untuk para pemimpin masa depan, namun saat ini juga dilakukan secara publik dan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, Internet, Cyberspace (Kampanye Cyber) (Hia & Siahaan, 2021).

Internet memiliki pengaruh yang semakin besar dalam politik Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Jelas bahwa akan selalu ada tumpang tindih dengan pengertian komunikasi politik online ketika membahas komunikasi politik Indonesia di masa depan. Tumbuhnya aktivitas yang dikenal dengan cyberpolitics penggunaan media online sebagai sarana komunikasi politik dipengaruhi oleh jumlah pengguna internet di Indonesia. Penggunaan internet, khususnya media sosial, dalam komunikasi politik dapat terlihat jelas pada pemilu federal tahun 2014.

Seperti diketahui secara umum, era Reformasi Keagamaan yang berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, membuka peluang yang cukup besar bagi perkembangan media massa bagi masyarakat Indonesia. Akibat penindasan media selama puluhan tahun oleh Suharto, media massa Indonesia mengalami apa yang dikenal sebagai euforia pasca reformasi. Namun, media massa menghadapi masalah baru kira-kira sepuluh tahun setelah reformasi. Hanya individu-individu yang bertugas mengendalikan pers dan media massa yang berubah. Selama perubahan media berdasarkan tujuan politik dan ekonomi di era Orde

Baru, negara memegang kendali. Media massa dan organisasi berita dalam sistem media massa ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berekspresi secara politik; sebaliknya, mereka memberi elit politik sebuah platform.

Dari sinilah, fungsi internet menjadi krusial, terutama dalam hal menawarkan ruang substitusi bagi demokrasi. Artikel ini akan bertujuan untuk meneliti manifestasi komunikasi di era digital, dengan ini peneliti berharap akan menjawab perkembangan politik digital dalam komunikasi politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011)

Penulis pada awalnya melakukan studi kepustakaan sebelum melakukan penelitian, yaitu dengan mencari referensi dari buku-buku atau karya-karya yang terkait dengan subjek penelitian untuk dijadikan landasan pemikiran yang dilakukan dalam penulisan ini. Publikasi ilmiah, artikel, literatur jurnal, dan berbagai catatan terkait pengelolaan komunikasi digital dalam kegiatan politik menjadi bahan referensi yang dimaksud.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menambah informasi penulis dan juga memperbanyak data-data yang dibutuhkan dalam penulisan, penyesuaian dan pengamatan mengenai objek penelitian di lapangan. Koentjaraningrat (2009:35) menyatakan bahwa studi kepustakaan bersifat penting karena membantu penulis menemukan gejala-gejala dalam objek penelitian. Untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dan prakteknya di lapangan, penulis melakukan studi pustaka agar mendapatkan informasi dan bahan-bahan yang valid tentang manifestasi komunikasi politik di era digital. Informasi-informasi tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan tema tersebut.

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Hal ini juga sependapat dengan yang dikatakan Widoyoko (2014:46) bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dan mengetahui secara jelas tentang aktivitas komunikasi politik di era digital.

Dalam penelitian ini, metode penelitian wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden (Afifuddin, 2009:131). Menurut Koentjaraningrat (1993:138-139) bahwa pada umumnya ada beberapa macam wawancara yang dikenal. Beberapa macam wawancara dibagi ke dalam dua golongan besar : (1) wawancara berencana dan (2) wawancara tak berencana. Lokasi penelitian terletak di kpu kota bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama 20 tahun terakhir “ruang publik” ramai berisi tawaran-tawaran konsep demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa demokrasi di Indonesia baru ‘terasa’ ketika dentuman reformasi 1998 di gaungkan. Apakah demokrasi sebelumnya bukan demokrasi sesungguhnya? iya, jawaban ini merupakan dasar dari pergolakan kekuasaan selama 32 tahun sebelum era reformasi.

Era reformasi Indonesia di latar belakang adanya konsep atau pergerakan perpolitikan yang ‘stagnasi’ dan tidak bergerak dari tahun ke tahun. Stagnasi tersebut bertahan hingga 32 tahun dimasa pemerintah soeharto. Rezim reformasi telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa, namun banyak kelompok masyarakat sipil yang kritis dan skeptis terhadap masa depan demokrasi negara ini. Runtuhnya rezim Orde Baru (Orba) tahun 1998 tidak secara mutatis mutandis membawa perubahan Indonesia menuju demokrasi yang terkonsolidir. Azyumardi Azra menyebut demokrasi Indonesia kini berada di titik terendah dalam dua puluh tahun (Harian Kompas, 2019). Bahkan Edward Aspinall dan Marcus Mietzner menyimpulkan, Indonesia tidak (lagi) demokrasi penuh (full democracy) tetapi telah berevolusi menjadi semacam bentuk tak liberal pemerintahan demokrasi (illiberal democracy) (Harian Jakarta, 2020). Walaupun mungkin sebagian masyarakat awam tidak merasakan gejala yang kurang dari praktik demokrasi di Indonesia saat ini.

Pandangan Edward Aspinall tersebut sangat beralasan, hal ini dapat di lihat pada indeks demokrasi Indonesia yang di lakukan oleh Vdem menempatkan Indonesia pada posisi 63 indeks demokrasi liberalnya dari 179 negara yang di kategorikan demokrasi di dunia (Danescu, 2019). Dari titik ini dapat dipahami bahwa alasan Edward Aspina jika Indonesia (belum) malakukan demokrasi secara penuh.

Indeks Demokrasi

Isu terkait pemilihan dalam negara demokrasi merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi dalam beberapa coraknya menjadi “rule of models” di berbagai negara. Berbagai konsep dan paradigma yang digunakan dalam melihat demokrasi baik sebagai teori maupun secara tekhnis di beberapa negara. Demokrasi secara garis besar adalah dialektika intens antara penguasa dan rakyat, bagaimana menghadirkan keterwakilan (baca; penguasa) dan yang diwakili/rakyat. Pergerakan model-model demokrasi telah ada sejak tahun 1900. Dalam pandangan Robert A. Dahl bahwa kategorisasi dan perkembangan negara-negara demokrasi dapat ukur sejak tahun 1900-an (Dahl, 2004).

Democratic Country: 1900-1995

Decade	Democratic Countries	Non-Democratic Countries	Percentage Democracies
1900 - 1909	8	40	17%
1920 - 1929	22	42	34%
1940 - 1945	25	50	33%
1960 - 1969	40	79	34%
1994 - 1997	86	106	45%

Polarisasi dan perkembangan demokrasi terus bergerak dan memberikan beberapa ‘warna’ baru dalam demokrasi. Demokrasi dalam perkembangannya telah membarikan rule dan model dalam ‘mengatur’ kekuasaan, baik dalam bernegara maupun berorganisasi. Pada perkembangan selanjutnya, dalam jurnal V-Dem pada tahun 2018 mengungkapkann terdapat 176 negara yang di kategorikan demokrasi dan menempatkan 5 negara yang memiliki indeks demokrasi tertinggi pada tahun 2019, yakni swiss, Taiwan, uruguay, Slovenia dan selandia baru (Danescu, 2019).

Table A1: Country Scores for the Liberal Democracy Index (LDI) and all Components Indices

Country	Liberal Democracy Index (LDI)			Electoral Democracy Index (EDI)			Liberal Component Index (LCI)			Egalitarian Component Index (ECI)			Participatory Component Index (PCI)			Deliberative Component Index (DCI)		
	Rank	Score	SD+/-	Rank	Score	SD+/-	Rank	Score	SD+/-	Rank	Score	SD+/-	Rank	Score	SD+/-	Rank	Score	SD+/-
Norway	1	0.867	0.037	1	0.913	0.027	6	0.958	0.027	1	0.966	0.027	26	0.649	0.020	1	0.989	0.651
Sweden	2	0.865	0.035	2	0.903	0.032	2	0.967	0.014	19	0.897	0.047	36	0.629	0.034	4	0.971	0.631
Denmark	3	0.846	0.037	5	0.888	0.039	4	0.966	0.023	2	0.957	0.034	10	0.720	0.015	3	0.972	0.648
Estonia	4	0.843	0.057	3	0.901	0.036	9	0.944	0.041	6	0.929	0.035	31	0.640	0.030	15	0.927	0.642
Switzerland	5	0.838	0.043	7	0.881	0.040	3	0.966	0.018	4	0.935	0.045	1	0.874	0.026	2	0.977	0.640

Sementara pada tahun 2019 V-Dem memberikan lima negara tertinggi dari indeks komponen demokrasinya yakni Denmark, Estonia, Swedia, Swiss dan Norwegia (Danescu, 2019).

TABLE 4: COUNTRY SCORES FOR THE LIBERAL DEMOCRACY INDEX (LDI) AND ALL COMPONENTS INDICES

↑ indicates that the country's score has improved over the past 10 years at a statistically significant level

↓ indicates that the country's score has decreased over the past 10 years at a statistically significant level

SD+/- reports the standard deviation to indicate the level of uncertainty

COUNTRY	LIBERAL DEMOCRACY INDEX (LDI)			ELECTORAL DEMOCRACY INDEX (EDI)			LIBERAL COMPONENT INDEX (LCI)			EGALITARIAN COMPONENT INDEX (ECI)			PARTICIPATORY COMPONENT INDEX (PCI)			DELIBERATIVE COMPONENT INDEX (DCI)		
	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-
Denmark	1	0,858	0,039	1	0,9	0,033	1	0,967	0,019	2	0,94	0,029	10	0,711	0,011	5	0,959	0,646
Estonia	2	0,84	0,048	2	0,892	0,04	7	0,95	0,027	11	0,913	0,044	24	0,65	0,035	33	0,879	0,649
Sweden	3	0,829	0,048	8	0,874	0,046	5	0,959	0,02	13	0,91	0,062	31	0,642	0,032	19	0,923	0,626
Switzerland	4	0,827	0,043	11	0,873	0,043	2	0,964	0,014	6	0,926	0,042	1	0,875	0,023	3	0,974	0,645
Norway	5	0,825	0,056	9	0,874	0,047	6	0,95	0,021	1	0,948	0,032	29	0,644	0,024	1	0,984	0,657

Pada tahun 2020 V-Dem memmberikan komponen indeks demokrasi tertinggi kepada negara Denmark, Swedia, Norwegia, Costa Rika, Swiss (Alizada,2021).

TABLE 4: COUNTRY SCORES FOR THE LIBERAL DEMOCRACY INDEX (LDI) AND ALL COMPONENTS INDICES, IN 2020

↑ Indicates that the country's score has improved over the past 10 years, substantively and at a statistically significant level

↓ Indicates that the country's score has decreased over the past 10 years, substantively and at a statistically significant level

SD+/- reports the standard deviation to indicate the level of uncertainty

COUNTRY	LIBERAL DEMOCRACY INDEX (LDI)			ELECTORAL DEMOCRACY INDEX (EDI)			LIBERAL COMPONENT INDEX (LCI)			EGALITARIAN COMPONENT INDEX (ECI)			PARTICIPATORY COMPONENT INDEX (PCI)			DELIBERATIVE COMPONENT INDEX (DCI)		
	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-	RANK	SCORE	SD+/-
Denmark	1	0.88	0.042	1	0.91	0.038	1	0.98	0.014	1	0.97	0.025	9	0.71	0.013	4	0.97	0.64
Sweden	2	0.87	0.042	2	0.9	0.038	2	0.98	0.015	15	0.9	0.047	28	0.65	0.025	12	0.94	0.624
Norway	3	0.86	0.044	4	0.9	0.039	5	0.96	0.02	2	0.96	0.026	27	0.66	0.018	1	0.99	0.641
Costa Rica	4	0.85	0.042	3	0.9	0.036	10	0.95	0.024	16	0.9	0.051	20	0.67	0.034	6	0.96	0.64
Switzerland	5	0.85	0.048	6	0.89	0.042	6	0.96	0.024	3	0.94	0.041	1	0.87	0.018	3	0.98	0.649

Dari pemaparan table di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan demokrasi telah merubah wajah dunia, yang mana tiap tahunnya mengalami perkembangan dari tahun 1900 hingga 1997. Fenomena ini memberikann ‘hawa baru’ bagi negara-negara yang bertransformasi ke wilayah demokrasi. Bahkan tidak sampai pada titik menjalankan dan menerapkan konsep demokrasi belaka, negeri-negara yang ada di dunia terus mencoba melihat, membandingkan dan menerapkan beberapa konsep, paradigma serta mekanisme dari sebuah (beberapa) teori tentang demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang di paparkan oleh V-Dem Institute terkait komponen-komponen demokrasi yang diterapkan di sebuah negara (Danescu, 2019).

Dalam kontek ke indonesiaan V-dem juga memberikan hasil survey terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Berikut ini hasil survey peringkat demokrasi di Indonesia dalam kurung 3 tahun terakhir (Danescu, 2019).

KOMPUNEN PENILAIAN INDEKS DAN KOMPONEN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	SCORE	SKALA	SCORE	SKALA	SCORE	SKALA
INDEX DEMOKRASI LIBERAL	63	0,502-0,047 ↓	65	0,494-0,061 ↓	73	0,45-0,058 ↓
INDEX DEMOKRASI PEMILU	76	0,600-0,058 ↑	68	0,636-0,061 ↑	72	0,61-0,076 ↓
INDEX KOMPONEN LIBERAL	55	0,083-0,050 ↓	65	0,749-0,058 ↓	82	0,7-0,069 ↓
INDEX KOMPONEN EGALITARIAN	86	0,633-0,085 ↑	119	0,51-0,091 ↑	132	0,45-0,099 ↑
INDEX KOMPONEN PARTISIPASI	41	0,613-0,048 ↓	54	0,595-0,044 ↓	51	0,6-0,041 ↑
INDEX KOMPONEN DELIBERATIF	29	0,897-0,630 ↓	15	0,931-0,649 ↓	0	0,92-0,642 ↓

Dari hasil suvey indeks ini, dapat dilihat penurunan posisi indeks demokrasi di Indonesia. Dari table di atas pada tahun 2019 indonesia menempati urutan ke 63 dari 179 negara demokrasi di dunia, kemudian tahun 2020 menempati peringkat ke 65 dengan kata lain bahwa menurun 2 point dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 semakin menurun dengan kehilangan 8 point dan menempati peringkat ke 73 dari 179 negara demokrasi di dunia. Ada dua komponen signifikan yang sangat mempengaruhi pergerakan posisi Indonesia yakni pada komponen deliberative yang semakin menurun dan komponen egalitarian berangsur naik.

Dalam konsep demokrasi, PEMILU memegang peranan penting dari sebuah negara. Pemilu merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kewajiban bagi negara yang demokrasi. Indonesia mencatat telah melakukan pemilu sebanyak 12 kali yaitu, pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam perkembangan selanjutnya (terhitung pasca reformasi hingga saat ini. Berbagai strategi di pergunakan peserta (baca: partai) dalam memenangkan kontestasi hajatan Pemilu yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Tiap-tiap perhelatan menyisahkan berbagai polemic yang terjadi.pada tahun 1999.

Pelaksanaan Pemilu 1999, boleh dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa kepresidenannya. Demikian pula pada tahun Pemilu 2004, Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama dimana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu untuk memilih anggota legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. demikian pula pemilu-pemilu selanjutnya.

Belakangan ini, peran Internet dalam dunia politik Indonesia semakin penting, baik positif maupun negatif. Dalam konteks pembahasan komunikasi politik Indonesia ke depan, jelas terlihat bahwa selalu tumpang tindih dengan teori komunikasi politik online. Ini berdasarkan beberapa diskusi. Pertama, Internet Indonesia terus berkembang baik dari segi jumlah pengguna maupun teknologi. Dimulai dengan 1% dari total populasi pada tahun 1998 (Lim, 2003), penetrasi internet Indonesia telah melampaui 50% dari total populasi Indonesia. Banyaknya pengguna internet di Indonesia telah mempengaruhi menjamurnya aktivitas yang dikenal dengan *cyberpolitics*, penggunaan media online sebagai sarana komunikasi politik. Pemilu federal 2014 adalah contoh nyata penggunaan Internet, khususnya media sosial, dalam proses komunikasi politik.

Kedua, melihat rakyat sebagai elemen penting dalam komunikasi politik, menjadikan Internet sebagai masyarakat Indonesia di tengah hilangnya kepercayaan publik terhadap media/media tradisional yang lebih didominasi pasar dan kekuatan politik (Nugroho dkk, 2012). Seperti diketahui, era Reformasi berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, membuka ruang yang besar bagi pendirian media massa bagi masyarakat Indonesia. Setelah reformasi, media massa Indonesia mengalami apa yang disebut euforia karena Suharto membungkam media selama beberapa dekade. Namun, sekitar 10 tahun setelah reformasi, media massa menemukan tantangan baru. Penguasaan media massa/pers tetap, hanya aktor yang mengendalikannya saja yang berbeda. Di era orde baru, negara mendominasi media selama reformasi berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik. Dalam sistem media massa ini, media massa/kantor berita tidak memberikan ruang yang cukup bagi warga untuk berekspresi, tetapi justru memberikan ruang bagi elite untuk kekuasaan politik

Dari sini, peran internet, khususnya dalam memberikan ruang alternatif bagi demokrasi, menjadi sangat penting. Artikel ini merinci literatur terbaru tentang teori komunikasi politik di era internet dan literatur yang diharapkan dapat membantu peneliti mempelajari komunikasi politik online.

Pemilu yang Digital

Pemilu yang digital pada dasarnya sudah menjadi kewajiban dan keharusan pada saat ini. Metode atau pola-pola pelaporan manual (kertas) sudah harus ditinggalkan sebab dasar dari sebuah laporan adalah validasi dan otentik pada sebuah dokumen. Dalam dunia IT dokumen digital saat ini berselebaran di dunia maya. Dari sisi valid dan otentiknya dapat di ukur pada history record sebuah dokument digital serta “transaksi data” yang dapat di lalui oleh dokument tersebut. Saat ini kita dapat melakukan pembukaann rekening Bank melalui online. Dalam pengertian bahwa document “urgen” dari sebuah perusahaan keuangan memepercayakannya dengan menggunakan perangkat tekhnoogi yang ada saat ini. Hali ini bisa dijadikan bentuk atau pola transaksi pelaporan baik dari jajaran terendah penyelenggara pemilu hingga jajaran tertinggi dengan hasil yang valid, otentik dan real time.

Dalam penerapan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL, maka peran teknologi sangat dibutuhkan. Sebagai lembaga publik KPU di tuntutan untuk lebih terbuka dalam mengelolah tahapan. Penyampaian infoformasi terkait tahahaman dan proses merupakan kewajiban yang harud di emban oleh KPU. Saat ini KPU sedang berbenah diri terkait proses dann pola informasi publik, salah satunya adalah penguatan serta penyampaian regulasi, tahapan dan hasil pemilihan pada kanal-kanal website KPU kab/Kota. Hal ini dilakukan agar kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada KPU sebagai penyelenggara semakin meningkat. Kemudian yang takkalah pentingnya adalah dasar pijak penggunaan teknologi. Regulasi terkait penggunaan teknologi di

KPU belum mencakup semua proses-proses tahapan, sehingga hanya ada beberapa aplikasi yang berbasis teknologi yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam PKPU salah satu diantaranya adalah penggunaan aplikasi sidalih (system data pemilih) sementara pengembangan dari aplikasi belum termuat dalam aturan KPU.

Terkait pembuatan dan penggunaan aplikasi saat ini KPU memepriapkan sebuah regulasi yang dapat menjadi dasar utama dari beberapa aplikasi yang di gunakan dalam proses pemilihan dan hapapan. Jika sebelumnya ada sidalih, maka sipol, si rekap, si log, si tps, si coklit dan aplikasi mobile data pemilih berkelanjutan saat ini sementara dalam proses pembuatan regulasi sebagai dasar dari penggunaannya kedepan. Setelah dasar regulasi terpenuhi maka uji coba serta uji validitas atas sebuah aplikasi harus dilakukan. Hal ini menajdi suatu keharusan dalam penerapan sebuah aplikasi. Asas utama dalam sebuah aplikasi adalah 3S-1T yaitu simple= dapat digunakan dengan mudah oleh penyelenggara, Secure adalah aplikasi tersebut sudah melalui uji coba dan dipastikan aman dan share= artinya informasi yang dipeoleh oleh aplikasi tersebut dapat di share pada Lembaga-lembaga kepemiluan seperti BAWASLU, PERLUDEM, NETGRIT dan Masyarakat. Dengan terwujudnya 3S maka akan memperoleh 1 T yakni Trush atau kepercayaan publik terhadap Lembaga KPU.

Selanjutnya dalam perekrutan tenaga adhoc maka peran teknologi juga sangat di butuhkan, seperti yang dilakukan oleh KPU makassar pada pilwali 2020 . Calon tenaga Adhoc harus mendaftar melalui kanal/ website resmi KPU dan setelah terdaftar maka wajib melalui tes CAT (computer asisten test) yang mana hasil dari test tersebut tidak dapat di interfensi oleh oknum-oknum penyelenggara.

Kemudian adanya penggunaan perangkat IT yang mumpuni serta aplikasi yang teruji dalam penyelenggaraan tahapa pada pemilihan selanjutnya. Kemudian adalah adanya proses perekrutan tenaga adhoc yang terukur dan teruji sehingga adhock sebagai ujung tombak penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang belaku. Terakhir adalah proses perekrutan Komisioner kabupaten/Kota yang harus diseragamkan sehingga tidak ada lagi “resufle” komisioner di masa tahapan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis data dan berdiskusi terkait pandangan informan dan data-data yang ada tentang perkembangan demokrasi dan teknologi digital dan pengaruhnya terhadap komunikasi politik di Indonesia kita dapat melihat bahwa tren kepercayaan demokrasi di Indonesia terus menurun sejak runtuhnya orde baru. Demokrasi Indonesia cenderung berevolusi menuju illiberal democracy dengan munculnya data indeks demokrasi Indonesia yang di lakukan oleh Vdem menempatkan Indonesia pada posisi 63 indeks demokrasi liberalnya dari 179 negara yang di kategorikan demokrasi di dunia. Ada dua komponen signifikan yang sangat mempengaruhi pergerakan posisi Indonesia yakni pada komponen deliberative yang semakin menurun dan komponen egalitarian berangsur naik dan mengakibatkan indeks demokrasi di Indonesia terus turun sejak 2019 hingga 2021. Dalam konsep demokrasi, PEMILU memegang peranan penting dari sebuah negara. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu menunjukkan kualitas demokrasi yang sedang terjadi. Kemudian muncul teknologi yang berkembang menuju arah digital dimana internet menjadi salah satu area teknologi digital yang berkembang sangat pesat. Peran internet, khususnya dalam memberikan ruang alternatif bagi demokrasi, menjadi sangat penting dengan perkembangan saat ini. Dimana memunculkan ide tentang “Pemilu Digital” yang bisa mendukung asas pemilu yang LUBER dan JURDIL. Data yang diproses dalam pemilu digital dapat dibuat transparan dan mudah ditinjau histori data yang

ada dibandingkan data konvensional saat ini. Diharapkan dengan transparannya data membuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil PEMILU menjadi lebih tinggi. Dari data yang ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bebenah diri dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini. Saat ini KPU sedang berbenah diri terkait proses dan pola informasi publik, salah satunya adalah penguatan serta penyampaian regulasi, tahapan dan hasil pemilihan pada kanal-kanal website KPU kab/Kota. Terkait pembuatan dan penggunaan aplikasi saat ini KPU mempersiapkan sebuah regulasi yang dapat menjadi dasar utama dari beberapa aplikasi yang di gunakan dalam proses pemilihan. Dengan munculnya pembaharuan terkait proses PEMILU dengan pemanfaatan teknologi digital diharapkan ditahun-tahun kedepan hasil pemilu dapat lebih dipertanggungjawabkan dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat serta indeks demokrasi Indonesia juga dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Alizada, N., Cole, R., Gastaldi, L., Grahn, S., Hellmeier, S., Kolvani, P., ... & Lindberg, S. I. (2021). *Autocratization turns viral. Democracy report 2021*. Retrieved April, 24, 2021.
- Cangara, H. (2008). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahl, R. A. (2004). *Democratic polities in advanced countries: Success and challenge. New Worldwide Hegemony*. Buenos Aires: Clacso.
- Danescu, E. (2019). *Varieties of Democracy (V-DEM) Annual Report 2019-" Democracy Facing Global Challenges"* (No. *Varieties of Democracy (V-DEM), Report" Democracy Facing Global Challenges"*(2019)). V-Dem Institute, the Department of Political Science at the University of Gothenburg.
- Hia, E. F., & Siahaan, C. (2021). *Komunikasi Politik Di Era Digital*. Humantech: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 6-18.
- Kirom, H., & Aryaningrum, K. (2022, June). *Pemahaman Siswa Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kecakapan Digital Di Masa Pandemi Covid-19*. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lim, M. (2003). *The Internet, social networks, and reform in Indonesia. Contesting media power: Alternative media in a networked world*, 273-288.
- Muhammad, M., & Si, M. (2005). *Komunikasi, Regulasi & Penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia.
- Nurfakhri, H., & Anggraini, C. (2022). Analisis Komparasi Gaya Narasi Politik Digital Melalui Instagram Pemimpin Daerah Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19. *eProceedings of Management*, 9(2).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahid, U. (2016). *Komunikasi politik: Teori, konsep, dan aplikasi pada era media baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wahyudi, V. (2018). Politik Digital di Era Revolusi Industri 4.0 “Marketing & Komunikasi Politik”. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(2), 149-168.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.